

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat pesisir dan laut merupakan dua hal yang sering diangkat menjadi topik penelitian. Meskipun sering menjadi topik penelitian, masyarakat pesisir dan laut di setiap daerah memiliki ciri khas serta keunikannya sendiri. Kelompok masyarakat pesisir memiliki sebuah dinamika kehidupan yang unik dibandingkan dengan kelompok masyarakat agraris. Masyarakat yang hidup dengan menggantungkan hidupnya pada laut memiliki semangat untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun. Semangat mereka dalam menjalani kehidupan di pesisir selalu dijalankan dan diterapkan secara turun temurun serta secara sukarela menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Adaptasi ini terbukti seiring berjalannya waktu, masyarakat pesisir selalu dilibatkan dalam pembangunan di wilayah pesisir, terutama pada masa pemerintahan Soeharto. Hal ini merupakan sebuah upaya pemerintah, mengingat potensi sumber daya laut yang melimpah, terlebih Indonesia merupakan negara maritim. Teknologi yang berkembang pun memaksa para nelayan untuk semakin terampil dalam memanfaatkannya.

Pendapatan nelayan di kawasan pesisir Prigi ditentukan oleh kondisi alam, sehingga proses penangkapan ikan tidak dapat berlangsung sepanjang tahun. Pada saat tertentu nelayan tidak melaut dikarenakan beberapa hal seperti angin kencang, gelombang besar dan arus laut yang kuat. Keadaan seperti ini seringkali disebut

dengan musim paceklik, yaitu suatu musim dimana nelayan tidak beraktifitas sama sekali.¹

Kabupaten Trenggalek merupakan sebuah wilayah yang terletak di bagian selatan provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki ragam potensi yang belum termanfaatkan secara maksimal. Salah satu potensi besarnya adalah potensi kelautan. Potensi kelautan yang ada di kabupaten ini merujuk pada fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai 81.000 km. Hal ini tentu menjadikan potensi sumberdaya pesisir dan lautan sangat besar.² Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km², yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dari kenyataan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat pesisir merupakan suatu kelompok masyarakat yang melandasi terselenggaranya sebuah negara maritim (*Sea Power Theory, Mahan*). Selain itu, masyarakat pesisir juga tidak dapat menolak untuk terlibat dalam perekonomian nasional.

Kabupaten Trenggalek memiliki 14 Kecamatan (Dongko, Panggul, Watulimo, Bendungan, Tugu, Pule, Durenan, Gandusari, Karangan, Munjungan, Kampak, Suruh, Pogalan, dan Trenggalek). Tiga kecamatan di kabupaten ini merupakan wilayah pesisir. Wilayah tersebut adalah kecamatan Munjungan,

¹ Ono Surono, *Koperasi Nelayan: Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap Berbasis Ekonomi Gotong Royong* (Jakarta Selatan: RMBooks, 2015), hlm. 30.

² D. G. Bengen, *Ekosistem dan Sumberdaya Pesisir dan Laut serta Pengelolaan secara Terpadu dan Berkelanjutan* (Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, 2001), hlm. 28.

kecamatan Watulimo dan kecamatan Panggul. Prigi sendiri merupakan nama teluk sekaligus nama desa pesisir yang ada di kecamatan Watulimo. Desa ini dikelilingi oleh pegunungan dan lautan.

Wilayah selatan Jawa Timur (Kabupaten Trenggalek) ini pernah tercatat sebagai daerah Perdikan pada masa pemerintahan Raja/Mpu Sindok (929/947). Wilayah Prigi merupakan daerah Perdikan Kampak yang dapat dibuktikan dalam prasasti Kamsyaka/prasasti Kampak (929)³. Selain itu, wilayah Kampak sering dijadikan sebagai tempat peribadatan memuja dewa karena letaknya yang berdekatan dengan laut selatan. Adanya fakta bahwa wilayah pesisir Prigi memiliki nilai historis yang menarik, maka penelitian tentang sejarah di wilayah selatan Jawa Timur atau pesisir Prigi ini tergolong penting.

Mayoritas desa pesisir di Kabupaten Trenggalek dikelilingi oleh pegunungan dan lautan. Tak terkecuali desa Prigi. Sebelum pemerintahan Soeharto, akses jalan menuju desa di pesisir selatan Jawa Timur ini cukup sulit. Jalan menuju desa ini masih terjal (belum aspal). Karena wilayah yang cukup terpencil, masyarakat sekitar masih memegang tradisi khusus (*Larung Sembonyo*). Tradisi nenek moyang ini masih dilakukan oleh masyarakat pesisir yang percaya dengan kekuatan magis karena selama ini dianggap telah memberikan sumber penghasilan serta menolong masyarakat dalam mengarungi samudera. Tradisi lain juga terdapat

³ Teguh Budiharso, *Meluruskan Sejarah Trenggalek Kota Gaplek: Studi Heuristik Folklor Panembahan Batoro Katong, Joko Lenggoro dan Menak Sopal* (Surakarta: Pusat Kajian Bahasa dan Budaya [LINGUA: Journal of Language, Literature and Teaching], 2015), hlm. 141.

di wilayah dataran tinggi (pegunungan/tegalan) yang jauh dari pesisir. Misalnya di daerah Dongko, masyarakat disana terbiasa meminta bantuan dukun.⁴

Sebagaimana mestinya, mayoritas masyarakat pesisir Prigi bermata pencaharian sebagai nelayan. Di sisi lain, beberapa orang memilih untuk berprofesi agraris, berdagang atau menjadi pegawai. Hal ini didukung oleh fakta bahwa wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur serta letak geografis wilayah Trenggalek yang dikelilingi oleh pegunungan. Pada tahun 1978, daerah daratan Prigi dipenuhi oleh tanah perkebunan serta areal persawahan yang cukup luas. Hal ini dapat dilihat dalam peta yang digagas oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Sebutan masyarakat Prigi merupakan sebutan umum untuk masyarakat pesisir yang beraktivitas di sekitar teluk Prigi. Latar belakang penyebutan ini terdapat pada kisah Babad Sumbreng, dalam tradisi Larung Sembonyo, bahwasanya lembah Prigi memiliki 3 wilayah kosmologi yang unik, yakni daerah pinggir, daerah tengahan dan daerah selatan.⁵

Meskipun masyarakat pesisir Prigi juga mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian, namun sektor perikanan memiliki daya tarik serta kelebihan tersendiri bagi masyarakat setempat. Dengan bekal geografis serta keadaan demografi yang mendukung, sektor ini mampu tumbuh dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Keunggulan pantai Prigi adalah laut itu sendiri, ke-

⁴ Wawancara dengan Pantiyah, 65 tahun, pedagang, tanggal 10 Desember 2020 di kediaman beliau, Desa Prigi, Trenggalek.

⁵ Kutipan diolah dan diinterpretasi kembali dari sumber yang dilacak melalui internet <https://beritagar.id/artikel>, (Misbahus Surur, dalam artikel *Menelisik Sejarah Pesisir Trenggalek Lewat Larung Sembonyo*, 2018) diakses tanggal 18 November 2019 pukul 17:30 WIB

eksotisan, serta akses jalan yang lebih memadai dari pantai selatan lain yang ada di Jawa Timur. Hasil laut yang dapat ditangkap cukup beragam, antara lain tongkol, semar, udang, cumi-cumi, teri dan lain-lain. Potensi laut sebesar ini kerap mengundang para pendatang untuk mencari tempat tinggal di kawasan Prigi. Hal ini berakibat pada peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di desa Prigi.⁶

Sebelum TPI berdiri, masyarakat nelayan tradisional Prigi membongkar hasil ikan yang ditangkap pada tanah khusus, bentuknya sederhana dan justru terlihat seperti lapangan kecil. Fasilitas yang ada sebelum tahun 1978 tergolong minim, karena pembangunan beberapa fasilitas masih dalam tahap perencanaan dan fasilitas vital seperti dermaga masih dalam tahap konstruksi. Pusat Pendaratan Ikan yang dibangun pada tahun 1970-an menjadi satu-satunya fasilitas penunjang nelayan. Pusat Pendaratan Ikan tersebut dikelola oleh masyarakat setempat. Pada tahun tersebut nelayan masih menggunakan perahu-perahu kecil dan alat tangkap ikan yang terbatas. Mayoritas nelayan menggunakan kail sederhana atau jaring biasa. Pelaksanaan pelayaran ke tengah laut juga tidak dilakukan terlalu jauh mengingat kondisi fisik kapal yang mereka miliki tidak cukup kuat serta belum maraknya mesin motor.⁷

Pada tahun 1970-an, akses jalan dari Kabupaten untuk mencapai desa Prigi masih tergolong sulit karena jalan termasuk sempit dan belum seluruhnya teraspal dengan baik. Namun, pasokan listrik sudah masuk ke desa ini sehingga wajar

⁶ Wawancara dengan Badar, 64 tahun, pensiunan, tanggal 26 November 2020 di kediaman beliau, Desa Prigi, Trenggalek.

⁷ Wawancara dengan Parkobet, 65 tahun, nelayan, tanggal 12 November 2020, di Pantai Prigi, Trenggalek.

apabila masyarakat setempat hanya mampu menyediakan Pusat Pendaratan Ikan sebagai fasilitas. Meski begitu, masih ada desa yang belum teraliri listrik misalnya desa Damas yang berada di wilayah cukup terpencil karena medan jalan yang terjal dan berliku. Memasuki tahun 1982, Pelabuhan Perikanan Pantai secara resmi dibangun. Masyarakat pesisir dan nelayan setempat turut membantu pemerintah desa dan pemerintah daerah (Kabupaten) untuk membantu melakukan perbaikan sarana dermaga terlebih dahulu. Seperti yang telah diketahui bahwasanya dermaga merupakan fasilitas vital dalam aktivitas bongkar muat para nelayan serta sebagai tempat bersandarnya perahu atau kapal. Sebelumnya, nelayan-nelayan kecil kesulitan untuk melakukan pembongkaran ke daratan. Apabila nelayan memaksa untuk menyandarkan kapalnya di tepian pantai, maka pengaruh ombak akan membuat rusak badan kapal atau perahu mereka.⁸ Melihat kondisi ini, pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten Trenggalek) memusatkan perhatian dengan melakukan pembangunan pelabuhan secara bertahap. Pembangunan dilakukan tidak hanya secara fisik saja akan tetapi juga secara non-fisik (pemberdayaan).⁹

Rencana pembangunan ini memang penting dan dibutuhkan oleh para nelayan, namun sayangnya pemerintah daerah belum tampak serius dalam mengentasi kemiskinan yang ada di pesisir Prigi. Pembangunan seolah-olah hanya mengutamakan kondisi fisik wilayah pesisir tersebut. Penggelontoran dana non-fisik sebagian besar untuk subsidi modal dasar pelelangan ikan. Pelelangan tersebut

⁸ Wawancara dengan Badar, 64 tahun, pensiunan, tanggal 26 November 2020 di kediaman beliau, Desa Prigi, Trenggalek.

⁹ Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Pantai Prigi, tahun 1982.

dikelola KUD Mina Tani Sempurna. Sayangnya, langkah ini belum dapat menjamin kebutuhan sehari-hari nelayan.

Revolusi biru merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Dalam pengelolaan pesisir, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan yang bersifat sentralistik dengan menempatkan peran negara sebagai figur sentral untuk mengembangkan pesisir di Indonesia. Pemerintah Orde Baru tidak pernah putus mengusung *jargon* modernisasi dalam membangun kawasan pesisir. Kebijakan Orde Baru bersifat *top-down* yang kurang mampu menjawab persoalan masyarakat pesisir yang beragam dan khas. Dampak yang ditimbulkannya kurang dapat menghapus kesenjangan sosial ekonomi masyarakat pesisir ataupun potensi konflik horizontal dalam interaksi sosial masyarakat pesisir. Contoh kebijakan Orde Baru yang bersifat *top-down* adalah program motorisasi pada era 1980-an, yaitu pengadaan perahu motor untuk nelayan yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas penangkapan ikan. Meski demikian, kebijakan motorisasi armada ini banyak mengalami kegagalan yang disebabkan oleh penetapan sasaran yang tidak tepat, justru dapat berseberangan dengan nelayan kecil, dimanfaatkan oleh elit atau aparat untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan menyingkirkan kepentingan umum para nelayan.¹⁰

Pembangunan pelabuhan turut memberi dampak terhadap *skill* nelayan, karena pada rentang tahun 1978 hingga 1983 nelayan disuguhkan teknologi berupa mesin motor. Nelayan-nelayan yang belum terbiasa menggunakan mesin motor

¹⁰ Victor P. H. Nikijuluw, *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu* (Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, 2001), hlm. 4.

pada saat itu mulai belajar mengaplikasikan mesin motor pada perahu atau kapalnya. Pada rentang tahun tersebut, mesin dan suku cadang asal Jepang atau China mulai berdatangan sehingga jumlah nelayan yang menggunakan perahu motor semakin bertambah.¹¹ Mesin dan suku cadang ini sebagian besar merupakan produk luar yang menandakan bahwa Indonesia pada saat itu belum mampu memproduksi mesin motor sendiri. Perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun kabupaten kiranya masih sebatas pembangunan sarana, karena pemerintah belum mampu memproduksi mesin maupun suku cadang secara masal. Pada masa ini, pemerintah juga mulai memperhatikan *softskill* para nelayan yang membutuhkan pengetahuan lebih terkait teknologi penangkapan ikan, penjualan dan pemasaran serta metode pengawetan ikan agar tetap segar saat dijual ke pasaran. Perhatian ini diwujudkan dengan mulai dibangunnya Balai Pertemuan Nelayan.¹²

Era reformasi pasca orde baru memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan tinjauan ulang atas kebijakan nasional dengan berkomitmen kembali pada kesadaran sebagai negara maritim. Seiring dengan arus perubahan pada era reformasi, kebijakan pemerintah pusat mengalami perubahan dengan mengkreasikan kebijakan yang bersifat *top-down* dan *bottom-up* menyusun perencanaan pembangunan daerah.¹³ Dengan kata lain, pemerintah telah

¹¹ Wawancara dengan Badar, 64 tahun, pensiunan, tanggal 26 November 2020 di kediaman beliau, Desa Prigi, Trenggalek.

¹² Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Pantai Prigi, tahun 1982.

¹³ Satries, Wahyu Ishardino, *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang* (jurnal-online ip.unikom.ac.id, Vol 2 No. 1, 89-130, 2014), hlm. 91.

mengembangkan kebijakan pembangunan yang tidak lagi bersifat *top-down* namun juga mendorong corak yang *bottom-up*. Beberapa contoh program pembangunan dengan mengusung *jargon bottom-up* yang terkait dengan pengembangan daerah pesisir adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Pengembangan Pesisir Tangguh (PKPT).¹⁴

Kedua program ini berkontribusi dalam pengembangan masyarakat nelayan mandiri. PEMP di wilayah Prigi sendiri dimulai pada tahun 2000. Pada masa ini diberlakukan program penguatan modal dana ekonomi produktif (DEP).¹⁵ Salah satu wujud dari pemberlakuan program ini ialah munculnya koperasi khusus yang difokuskan untuk melayani masyarakat nelayan. Modal dan pinjaman dibutuhkan oleh nelayan untuk bertahan hidup, mengingat musim ikan yang tak menentu. Sebagian nelayan mengandalkan bakul yang menawarkan pinjaman uang kepada mereka, sebagian yang lain mengandalkan koperasi tersebut. Pengadaan modal ini memberi pengaruh dan manfaat yang cukup besar terhadap perekonomian nelayan. Selain itu, disamping program PEMP, pihak pelabuhan juga menyelenggarakan lebih banyak seminar untuk meningkatkan *softskill* maupun *hardskill* para nelayan. Masyarakat kiranya mulai menghargai usaha pemerintah pada tahun 1999, karena pada tahun tersebut pengelolaan pelabuhan dari yang semula berada di bawah Departemen Pertanian dipindah ke Departemen Kelautan dan Perikanan.

¹⁴ Waluyo Handoko, Sofa Marwah dan Tri Rini Widyastuti, *Menjaga Sustainability Pengembangan Masyarakat Pesisir Kebumen: Antara Corak Top-Down, Partisipatif dan Inisiasi Kelembagaan Lokal* (jurnal-online FISIP UNSOED, Vol 19 No. 3, 244-252, 2017), hlm. 245.

¹⁵ Nevi Nur Laili, *Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) bagi Nelayan Pantai Prigi, Trenggalek* (Skripsi, Jurusan S1 Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, 2011).

Masyarakat di pesisir Prigi umumnya mengalami fluktuasi hidup yang cukup panjang. Faktor pendukung fluktuasi tersebut antara lain karena hadirnya kebijakan pemerintah, adaptasi teknologi, perubahan sarana dan prasarana sehingga berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini akhirnya berfokus pada pembangunan fasilitas Pelabuhan yang menghasilkan perubahan sosial-ekonomi masyarakat pesisir Prigi sepanjang tahun 1978-2001.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, pokok masalah penelitian ini adalah, bagaimana pembangunan fasilitas Pelabuhan Pantai Prigi mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang terjadi dari tahun 1978 hingga 2001.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan sosial-ekonomi pada masa pembangunan Pelabuhan Pantai Prigi. Penelitian ini berfokus pada fluktuasi pembangunan fasilitas pelabuhan yang berimbas terhadap kehidupan atau aktifitas sosial-ekonomi para nelayan maupun masyarakat pesisir Prigi secara umum.

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi di bidang sejarah kebudayaan maritim, khususnya yang terkait dengan wilayah pesisir selatan Jawa Timur. Secara metodologi, penulis berusaha menyusun

skripsi dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebenaran dari sumber yang didapat. Penulis juga berharap penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan dalam pengembangan studi Ilmu Sejarah serta berguna dalam hal referensi pembaca yang terkait dengan masyarakat pesisir Prigi. Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan program studi Sarjana yang berupa skripsi.

Sementara, manfaat praktis yang diharapkan penulis adalah penelitian ini dapat memperluas wawasan serta pengetahuan secara empirik mengenai penerapan fungsi Ilmu Sejarah yang telah diperoleh selama perkuliahan di Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan evaluasi bersama mengenai pembangunan, tata ruang kota maupun kebijakan-kebijakan lain, khususnya untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil skripsi ini.

1.4. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup spasial dalam penelitian ini adalah pesisir Prigi yang meliputi desa Prigi dan desa Tasikmadu, kecamatan Watulimo, kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pesisir Prigi ini terletak di kawasan teluk Prigi yang berada di sisi selatan Jawa Timur dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Pantai ini berjarak sekitar 48 km dari pusat administrasi Kabupaten Trenggalek. Pesisir pantai ini juga merupakan salah satu objek wisata alam ternama di Kabupaten Trenggalek.

Batasan temporal pembahasan ini adalah pada tahun 1978-2001. Tahun 1978 dipilih oleh penulis sebagai titik awal pembangunan pelabuhan di Prigi.

Pembangunan ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah orde baru (Soeharto) yang pada masa itu (1967) memusatkan perhatian pada bidang kelautan. Pada masa orde baru, mayoritas masyarakat nelayan di Indonesia masih awam dengan teknologi perikanan, mereka cenderung menggunakan perahu serta jaring ulung, dari penglihatan inilah akhirnya pemerintah memunculkan upaya revolusi biru pada tahun 1970.¹⁶ Kebijakan ini diadakan guna mendorong terjadinya modernisasi di kawasan pesisir. Selain itu, diharapkan pembangunan corak *bottom-up* dapat terealisasi. Untuk batasan akhir temporal, penulis menggunakan tahun 2001, dimana terjadi peningkatan status pelabuhan. Peningkatan status pelabuhan perikanan dari PPP ke PPN ini sekaligus sebagai ajang berbenah yang ditujukan pada pembangunan masyarakat pesisir. Usaha ini dibarengi dengan diadakannya program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.¹⁷

1.5. Kerangka Konseptual

Konsep yang ingin dibangun oleh penulis dalam penulisan skripsi ini ialah penulisan berdasarkan perspektif sejarah sosial-ekonomi. Oleh karena itu penulis banyak menggunakan pendekatan sosial-ekonomi dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pembangunan Pelabuhan Pantai Prigi yang secara

¹⁶ Dimas Wan Setiawan, *Kehidupan Masyarakat Nelayan di Lamongan* (Skripsi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, 2019), hlm. 7.

¹⁷ Harsuko Riniwati dan Pety Dwi Winarti, *Studi Evaluasi Tingkat Keberhasilan Program Kredit Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Berperspektif Gender di Kabupaten Trenggalek* (Publikasi Ilmiah Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 1.

historis memberikan dampak terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Prigi. Adapun kerangka konseptual dan landasan teori penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengertian masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹⁸ Masyarakat nelayan sendiri adalah kelompok manusia yang tinggal dan hidup di wilayah pesisir. Nelayan adalah mereka yang mata pencaharian pokoknya di bidang penangkapan ikan dan penjualan ikan yang hidup di daerah pantai.¹⁹ Untuk menangkap ikan diperlukan alat yang memadai misalnya perahu, pancing, jala atau jaring. Secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.²⁰ Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.²¹

Pembangunan merupakan suatu usaha perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka

¹⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 149.

¹⁹ R. Bintarto, *Pengantar Geografi Kota* (Yogyakarta: U.P. Spring, 1977), hlm. 25.

²⁰ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dalam Dinamika Ekonomi Pesisir* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 27.

²¹ Imron dalam M. Subri, *Ekonomi Kelautan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

pembinaan bangsa demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.²² Pembangunan yang terjadi pada Pelabuhan Pantai Prigi melahirkan respon serta adaptasi dari masyarakat. Respon berasal dari kata *response* yang berarti jawaban, menjawab, balasan atau tanggapan (*reaction*). Respon merupakan suatu kegiatan (*activity*) dari sebuah organisme yang bukan semata-mata suatu gerakan positif, akan tetapi setiap kegiatan (*activity*) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang juga dapat disebut respon.²³ Adaptasi sendiri berarti suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan, namun dapat pula berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi.²⁴ Menurut Kuntowijoyo dalam bukunya “Metodologi Sejarah”, sejarah sosial merupakan bahan garapan yang sangat luas dan beraneka ragam. Mayoritas sejarah sosial juga memiliki hubungan yang erat dengan sejarah ekonomi. Sehingga sering dipadukan menjadi sejarah sosial-ekonomi. Hal ini menguatkan bahwa penelitian sejarah membutuhkan beberapa pendekatan dan kerangka teoretis yang diperlukan dari ilmu sosial dan humaniora lainnya.²⁵

Pada judul penelitian ini, pembangunan bermakna perubahan dalam suatu proses perubahan sosial. Menurut Comte, perubahan sosial terjadi karena 3 faktor, yakni rasa bosan, lamanya umur manusia, serta faktor demografi. Perubahan sosial

²² Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gedung Agung, 1994), hlm. 37.

²³ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 51.

²⁴ M. Dahlan Yacub Al-Barry, *Kamus Sosiologi Antropologi*, (Surabaya: Penerbit Indah, 2001), hlm. 10.

²⁵ Susanto Zuhdi, *Nasionalisme, Laut dan Sejarah* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 83.

itu sendiri memiliki beberapa pola. Pola tersebut terdiri dari pola kebudayaan dan pola kemasyarakatan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pola kemasyarakatan, salah satu bahasannya adalah modernisasi.²⁶ Modernisasi disini terkait imbas dari produk industrialisasi seperti penggunaan teknologi terhadap alat penangkapan ikan.

Nelayan dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan yang dilihat dari kapasitas teknologi orientasi pasar dan karakteristik hubungan produksi. Keempat tingkatan nelayan tersebut adalah, 1). Pemenuhan kebutuhan sendiri (*subsisten*), 2). *Post-peasant fisher*, 3). *Commercial fisher*, dan 4). *Industrial fisher*. Dari pembagian tingkatan nelayan ini, diperoleh kelas sosial yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Untuk itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosial ekonomi. Pendekatan ini didasarkan pada konsep kajian sejarah kebudayaan maritim yang menggunakan metodologi strukturalistik sehingga menuntut untuk holistik.²⁷

Pendekatan sosial-ekonomi digunakan dalam rangka menyesuaikan realita yang ada di lapangan. Sebagian masyarakat nelayan masih dalam taraf perekonomian rendah. Menurut Mubyarto (1984), melalui penelitiannya tentang perekonomian masyarakat nelayan miskin di Jepara, kemiskinan nelayan lebih banyak disebabkan oleh adanya tekanan struktur, yakni kelompok kaya dan miskin. Dominasi kelompok kaya ini mengeksploitasi nelayan miskin. Hal ini berkorelasi

²⁶ Robert H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 409.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 88.

dengan nelayan yang ada di pesisir pantai Prigi juga, karena mereka sering menghadapi tekanan para nelayan kaya yang biasanya menguasai armada kapal.

Menurut Bambang Purwanto, penelaahan terhadap keadaan material maupun intelektual dari keseharian pada saat bekerja, di rumah, di sekolah, sedang bermain, sedang memasuki dunia dalam dari pengalaman populer di lingkungan tempat kerja, keluarga, tetangga, sekolah, atau semua hal yang dianggap sebagai bidang budaya dapat menghasilkan suatu kajian sejarah menjadi semakin luas dan sekaligus mampu mengungkapkan sisi manusiawi dari kenyataan masa lalu.²⁸ Sedangkan dalam konteks penulisan ini, keseharian yang dimaksudkan secara khusus adalah pola perilaku keseharian masyarakat pesisir pantai Prigi. Hal ini kemudian menjadi poin penulisan penelitian yang berfokus pada kehidupan sosial-ekonomi tanpa melupakan budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai Prigi. Fokus ini sekaligus sebagai upaya pencegahan pembahasan yang melebar.

1.6. Tinjauan Pustaka

Tulisan tentang masyarakat pesisir atau nelayan pantai Prigi tergolong cukup banyak. Masing-masing penelitian menggunakan data dan perspektif yang berbeda-beda. Sudut pandang yang digunakan pun bermacam-macam, antara lain sudut pandang antropologi, sosial, politik dan sebagainya. Namun, penelitian

²⁸ Bambang Purwanto, "Menulis Kehidupan Sehari-Hari Jakarta", dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari (ed), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia & KITLV-Jakarta, 2013), hlm. 271.

mengenai masyarakat pesisir Prigi dari sudut pandang sejarah masih tergolong minim, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penulis. Untuk sumber-sumber dan bahan referensi, penulis menggunakan beberapa literatur, diantaranya:

Buku “Menyisir pantai Utara: Usaha dan perekonomian nelayan di Jawa dan Madura, 1850-1940” karya Masyhuri. Buku ini membahas tentang perkembangan masyarakat pesisir yang mengalami dinamika perubahan sosial-ekonomi. Rentang waktu yang sangat lama ini menambah ragam fluktuasi. Aktivitas masyarakat pesisir pantai utara atau Madura ini memiliki kemiripan dengan masyarakat pesisir Prigi, khususnya nelayan tradisional.

Buku “Perspektif tentang Perubahan Sosial” karya Robert H. Lauer yang menjelaskan perspektif cendekiawan terhadap perubahan sosial. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa perubahan sosial dari tradisional ke modern tidak harus mengalami industrialisasi. Masyarakat pesisir Prigi sendiri tidak tinggal di wilayah industri, sehingga penulisan ini dapat berkorelasi dengan perspektif tersebut.

Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Pantai Prigi dari Tahun 1983 sampai 2000, Direktorat Jenderal Perikanan. Di dalam laporan tahunan ini ditemukan data-data yang berkaitan dengan peningkatan jumlah perahu motor, teknologi penangkapan ikan, pemberdayaan masyarakat nelayan, masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat nelayan dan lain sebagainya. Laporan Tahunan ini sekaligus menjadi bukti pembangunan Pelabuhan Pantai Prigi memberi dampak terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Prigi.

Tesis “Perkembangan Pelabuhan Perikanan Prigi dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Desa Tasikmadu, Kabupaten Trenggalek, 1978-2004”. Oleh Khoirun Nikmah, Sutejo K. Widodo, dan Alamsyah. UNDIP, 2018. Tesis ini berisi tentang perkembangan Pelabuhan Perikanan Prigi serta dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi nelayan Prigi.

Skripsi “Kehidupan Masyarakat Nelayan di Lamongan Tahun 1967-1999” oleh Dimas Wan Setiawan. Skripsi ini membahas tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Lamongan. Kebijakan revolusi biru yang diberikan oleh pemerintah Soeharto diterapkan pula oleh masyarakat nelayan Lamongan, namun respon yang diberikan oleh tiap-tiap pemerintah daerah tentu berbeda. Oleh karena itu tulisan skripsi ini mampu memberikan ide-ide serta mempermudah penulisan ini.

Hasil penelitian dari Putu Gede Suwitha yang berjudul “Kotamadya Pare-Pare: Dinamika Sebuah Kota Pelabuhan” (UNHAS). Tulisan ini merupakan *research* yang cukup mendekati konsep penulisan. Hal ini dikarenakan pembahasan tidak hanya berfokus pada perkembangan pelabuhan saja akan tetapi juga mengikutsertakan perubahan sosial yang berdampak pada perekonomian serta kebudayaan masyarakat setempat. *Research* ini ditulis secara historis sehingga mampu menerangkan dengan jelas bagaimana dinamika yang ada pada masa kolonial hingga era orde baru.

Untuk sumber-sumber lain, penulis menggunakan sumber primer seperti arsip dari lembaga arsip daerah Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur,

laporan tahunan Pelabuhan Perikanan Prigi, serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. Penulis juga menggunakan sumber lisan untuk memperkuat penulisan dengan melakukan wawancara pada pelaku serta saksi-saksi sejarah yang mengetahui seluk-beluk pesisir Prigi.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Pertama-tama membuat pokok-pokok bahasan untuk menjawab segala permasalahan yang diajukan, pengumpulan sumber dengan mengacu pada rentang tahun penelitian. Karena pembahasan dilakukan pada era kontemporer, maka sumber dapat diperoleh dari sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis diperoleh dari arsip, buku serta jurnal, sementara sumber lisan diperoleh dari wawancara terhadap pihak terkait. Selanjutnya dilakukan kritik intern dan ekstern, analisis dan interpretasi, serta penyajian dalam bentuk penulisan. Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan dimulai dari:

Pemilihan topik. Pemilihan topik dilakukan berdasarkan kedekatan emosional penulis terhadap tempat dibesarkannya, terlebih dapat merekatkan ikatan sosial khususnya terhadap masyarakat setempat yang diwawancara. Selain itu, ada alasan kedekatan intelektual berupa pengetahuan penulis terhadap minat studi sejarah sosial-ekonomi.

Melakukan pengumpulan sumber atau *heuristik*. Sumber-sumber tertulis seperti arsip diperoleh dari lembaga arsip daerah Kabupaten Trenggalek dan

Provinsi Jawa Timur, Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Prigi, serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. Adapun sumber lisan diperoleh dari hasil wawancara terhadap narasumber yang terkait dengan penelitian.

Melakukan kritik sumber (*verifikasi*) dengan dua tahap yakni kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah usaha pembuktian bahwa sumber yang diperoleh dapat dipercaya. Sedangkan kritik ekstern adalah penentuan keotentikan dan keaslian sumber.²⁹ Kritik ekstern ini dapat dilihat dari keutuhan sumber (ada tidaknya penambahan atau turunan) seperti penggandaan atau muat ulang. Terakhir, penulisan dikembangkan sedemikian rupa agar sesuai dengan tema yang dipilih.

Interpretasi penelitian ini dilakukan setelah tahapan *verifikasi*. Di dalam tahapan ini, penulis melakukan analisis terhadap sumber-sumber yang ada, baik sumber lisan maupun tertulis. Analisis dilakukan untuk menemukan makna, kemungkinan-kemungkinan, serta menafsir hal-hal yang saling berkaitan. Analisis kemudian diproses untuk disatukan (*sintesis*).

Historiografi penelitian dilakukan secara diakronik. Berbeda halnya dengan penelitian sosial yang sistematis, penelitian sejarah lebih mengutamakan kronologi. Namun bukan berarti penelitian ini tidak ditulis secara sistematis. Historiografi penelitian ini mencakup 3 hal pokok yakni pengantar, hasil penelitian serta simpulan yang dijelaskan lebih lanjut di sistematika penulisan.

²⁹ Sarkawi B. Husein, *Modul: Metode Sejarah* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2002), hlm. 46.

1.8. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan karakteristik penulisan sejarah yakni kronologis. Maka penulisan dibagi menjadi tiga babak atau bagian yakni pengantar, hasil penelitian serta simpulan.³⁰ Ketiga bagian penulisan tersebut dijabarkan lagi menjadi beberapa BAB, yakni :

Pada BAB I, terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Pada BAB II dijelaskan tentang keadaan geografis Kabupaten Trenggalek, keadaan demografi serta karakteristik masyarakat Prigi pada masa orde baru, khususnya pada tahun 1970-an. Pada BAB ini penulis mengungkap fakta-fakta seputar kawasan Prigi yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Penulis juga menjelaskan faktor-faktor yang membuat desa Prigi istimewa dari desa lainnya, serta usaha-usaha masyarakat nelayan tradisional dalam bertahan hidup.

Pada BAB III dijelaskan aktifitas masyarakat pesisir serta proses terjadinya perubahan sosial-ekonomi pada masa orde baru. Pada rentang tahun 1978 hingga 2001 penggunaan teknologi semakin meningkat seiring dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah yang mengacu pada ide revolusi biru. Alat-alat nelayan yang bersifat tradisional mulai tergantikan dengan alat-alat yang lebih modern. Hal ini

³⁰ *Ibid.*, hlm. 80

didukung oleh pengadaan mesin motor dari Jepang dan China pada tahun 1978. Jaring nelayan yang semula hanya sepanjang belasan meter juga berubah menjadi berpuluh-puluh meter.

Pada tahun 1978 pelabuhan perikanan mulai dibangun dan masyarakat nelayan mulai mendapatkan penyuluhan terkait metode penangkapan ikan, pemasaran ikan, serta penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini seringkali melahirkan kesenjangan sosial terhadap nelayan kecil yang masih bertahan dengan perahu tradisionalnya (tanpa motor). Mayoritas alasannya adalah karena ketidakmampuan mereka untuk membeli mesin motor yang pada waktu itu hanya dapat dijangkau oleh para pemilik modal atau juragan kapal. Selain aktivitas ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan juga dibahas disini, mengingat dampaknya yang cukup signifikan terhadap nelayan. Di BAB ini penulis menjelaskan kemunculan koperasi dan para pemilik modal yang membantu para nelayan Prigi dalam mengembangkan usahanya. Pada BAB ini, penulis juga mengaitkan dampak penerapan kebijakan pemerintah terhadap perekonomian masyarakat pesisir Prigi.

Selain itu, BAB ini juga menjelaskan tentang perkembangan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai Prigi pasca orde baru. Peralihan dari era orde baru ke era reformasi termasuk dalam perubahan sosial yang mau tidak mau memberikan dampak terhadap masyarakat pesisir Prigi. Di BAB ini penulis juga menerangkan lebih lanjut terkait kondisi perkampungan nelayan pada tahun 2000-an. Penulis menjelaskan terkait respon dan adaptasi perkampungan tersebut terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat pesisir Prigi pasca orde baru. Disini

penulis juga berupaya untuk menjelaskan kebudayaan atau tradisi yang masih bertahan di tengah-tengah perubahan tersebut. Adapun tradisi yang masih bertahan di pesisir pantai Prigi salah satunya yakni Larung Sembonyo.

Pada bab terakhir, BAB IV merupakan penutup yang diakhiri dengan kesimpulan penelitian. Selebihnya memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.